



MUDRA

JURNAL SENI BUDAYA
VOLUME 25 NO. 2 SEPTEMBER 2010

Jurnal seni budaya ini merangkum berbagai topik kesenian, baik yang menyangkut konsepsi, gagasan, fenomena, maupun kajian beberapa bentuk kesenian.

Karena itu, dari jurnal ini kita memperoleh dan memetik banyak hal tentang kesenian dan permasalahannya.

MUDRA memang diniatkan sebagai penyebar informasi seni budaya. Sebab itu, para mahasiswa, dosen, peneliti kesenian, atau siapa saja yang menaruh perhatian terhadap kesenian, patut membaca dan memiliki jurnal seni budaya ini.

INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
UPT PENERBITAN
2010

MUDRA

JURNAL SENI BUDAYA
VOLUME 25 NO. 2 SEPTEMBER 2010



INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
2010

DEWAN PENYUNTING

Jurnal Seni Budaya MUDRA

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 108/DIKTI/Kep/2007. tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2007 Jurnal Seni Budaya MUDRA diakui sebagai jurnal terakreditasi, dengan peringkat B.

Ketua Penyunting

I Wayan Rai S.

Wakil Ketua Penyunting

Rinto Widyarto

Penyunting Pelaksana

I Ketut Murdana

I Wayan Setem

I Gusti Ngurah Seramasara

Diah Kustiyanti

Ni Made Ruastiti

Ni Luh Sustiawati

Penyunting Ahli

I Wayan Rai S. (ISI Denpasar) *Ethnomusicologist*

Margaret J. Kartomi. (Monash University) *Ethnomusicologist*

Jean Couteau. (Sarbone Francis) *Sociologist of Art*

Ron Jenkins. (Wesleyan University) *Theatre*

Michael Tenzer. (UMBC) *Ethnomusicologist*

ISSN 0854-3461

Alamat Penyunting dan Tata Usaha:

UPT. Penerbitan ISI Denpasar Jalan Nusa Indah Denpasar 80235

Telepon (0361) 227316, Fax. (0361) 236100 E-Mail: isidenpasar@yahoo.ac.id.

MUDRA diterbitkan oleh UPT. Penerbitan Institut Seni Indonesia Denpasar. Terbit pertama kali pada tahun 1990.

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Persyaratan seperti yang tercantum pada halaman belakang (Petunjuk Untuk Penulis). Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah dan tata cara lainnya

Dicetak di Percetakan PT. Percetakan Bali

Mengutip ringkasan dan pernyataan atau mencetak ulang gambar atau label dari jurnal ini harus mendapat izin langsung dari penulis. Produksi ulang dalam bentuk kumpulan cetakan ulang atau untuk kepentingan periklanan atau promosi atau publikasi ulang dalam bentuk apa pun harus seizin salah satu penulis dan mendapat lisensi dari penerbit. Jurnal ini didedarkan sebagai tukaran untuk perguruan tinggi, lembaga penelitian dan perpustakaan di dalam dan luar negeri. Hanya iklan menyangkut sains dan produk yang berhubungan dengannya yang dapat dimuat pada jurnal ini.

Permission to quote excerpts and statements or reprint any figures or tables in this journal should be obtained directly from the authors. Reproduction in a reprint collection or for advertising or promotional purposes or republication in any form requires permission of one of the authors and a licence from the publisher. This journal is distributed for national and regional higher institution, institutional research and libraries. Only advertisements of scientific or related products will be allowed space in this journal.

MUDRA

JURNAL SENI BUDAYA

VOLUME 25

SEPTEMBER 2010

Nomor 2

1. Multikulturalisme dalam Diskursus Memperkuat Kebinekaan dan Kemejemukan di Indonesia
Anak Agung Gede Rai 101
2. Multikulturalisme dan Pariwisata Bali
Ni Made Ruastiti 108
3. Eksistensi *Desa Pakraman* dalam Pelestarian Adat dan Budaya Bali
I Wayan Suarjaya 120
4. Kebudayaan dan Kebijakan Keruangan : Esensi Budaya dalam Pengaturan Batas Ketinggian
Bangunan Bali
Gusti Ayu Made Suartika 131
5. Reklamasi Pantai Sanur dalam Perspektif Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat Bali
I Made Darma Oka 150
6. Estetika Hindu : *Rasa* sebagai *Taksu* Seni Sastra
I Wayan Suka Yasa 159
7. Penerapan Konsep Joged Mataram dalam Tari
Supriyanto 172
8. Pragmatik Imperatif dalam Dialog Lakon "Semar Mbangun Gedhong Kencana"
Sajian Ki Mujaka Jaka Raharja
S. Hesti Heriwati..... 185

MULTIKULTURALISME DAN PARIWISATA BALI

Ni Made Ruastiti

Jurusan Tari, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Denpasar, Indonesia

Abstrak

Multikulturalisme dapat diartikan sebagai suatu paham yang menjunjung tinggi atau menghormati keberagaman kultural. Paham ini muncul sebagai reaksi atas tekanan globalisasi yang cenderung menyatukan dunia (budaya) menjadi satu di bawah pengaruh ideologi kapitalisme, atau modernisme. Dibukanya Bali sebagai daerah tujuan wisata telah memberi dampak positif dan negatif bagi masyarakat setempat. Kunjungan wisatawan ke Bali yang tentunya selalu disertai kebudayaannya tampak tidak semata-mata berdimensi ekonomi, akan tetapi juga berdimensi kultural. Berkembangnya pariwisata di Bali memang benar dapat memberikan peluang kerja, dan oleh karenanya banyak orang luar bermigrasi ke daerah ini untuk mencari nafkah. Mereka juga datang ke daerah ini disertai dengan kebudayaannya masing-masing. Kondisi ini dapat menimbulkan dampak multikultural di daerah ini, yang jika tidak ditanggulangi secara tepat akan dapat menimbulkan disintegrasi sosial.

Multiculturalism and Bali's Tourism

Abstract

It may be stated that multiculturalism refers to a view which glorifies or respects cultural diversity. This view has appeared as a response to the global pressure which has tended to unify the world (culture) under the ideology of capitalism or modernity. The tourism developed in Bali, as a tourist destination, has positively and negatively affected the local community. The tourists who visit Bali bring their own culture. This means that what they bring is not only economically dimensional but culturally dimensional as well. The development of tourism in Bali has created a lot of job opportunities and; as a consequence, many people from outside Bali have migrated to Bali to earn a living. These people also bring their own culture. This condition will lead to multiculturalism, which, if not accurately dealt with, will lead to a social disintegration.

Keywords : Multicultural, tourism, and cultural

Multikulturalisme dapat diartikan sebagai suatu paham yang menjunjung tinggi atau menghormati keberagaman kultural. Paham ini sesungguhnya muncul sebagai reaksi atas tekanan globalisasi yang cenderung menyatukan dunia (budaya) menjadi satu di bawah pengaruh ideologi kapitalisme, atau modernisme. Sebagai bangsa yang memiliki sejarah yang panjang, kiranya tidak dapat dihindarkan bahwa bangsa Indonesia berada dalam kehidupan dengan budayanya yang beraneka ragam, seperti antara lain:

kultur, atau budaya etnis Jawa, Madura, Sumatra, Sunda, Makasar, Bugis, Bali, dan lain-lain, yang hidup berdampingan, dan saling melengkapi satu sama lain.

Sebagai suatu bangsa, sejak diproklamasikannya kemerdekaan RI tahun 1945, masyarakatnya telah hidup sebagai satu kesatuan bangsa dengan berbagai kebudayaannya yang secara keseluruhan kemudian menjadi embrio dari kebudayaan bangsa Indonesia. Bersamaan dengan itu, bangsa Indonesia menetapkan

dasar negara, falsafah hidup bangsa ini untuk hidup bersatu berdasarkan Pancasila. Keinginan untuk hidup bersatu berdasarkan Pancasila, tampak pula sebagai satu perjuangan panjang dan terus-menerus sejalan dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia. Bersamaan dengan cita-cita hidup dalam suasana multikultural itu, bangsa Indonesia mendapat cobaan baik dari dalam maupun dari luar. Tantangan dari dalam adalah adanya bibit-bibit budaya etnik yang tidak dapat hidup secara berimbang dengan etnik yang lainnya, dan adanya tekanan pusat yang dapat menimbulkan kecemburuan pada pihak yang dikecewakan. Sedangkan tantangan dari luar muncul akibat gelombang globalisasi yang begitu dinamis menerobos masuk ke dalam kehidupan berbangsa. Tantangan globalisasi yang dikenal sebagai “era modern”, budaya modernitas ini mendorong masyarakat masuk dalam satu tatanan bertaraf dan berstandar Internasional, yang telah membuat merosotnya semangat berkebangsaan. Setiap individu tergiring untuk menjadi warga nomor satu yaitu warga dunia, dengan semangat konsumerisme. Hal ini tampaknya telah menimbulkan krisis berkebangsaan yang cukup panjang, yang dapat mengancam keutuhan bangsa ini jika tidak segera disikapi secara tepat. Semangat multikultural inilah diharapkan mampu mengantisipasi terjadinya ketidak seimbangan itu.

MULTIKULTURALISME DAN ETNISITAS

Pemerintah Indonesia yang menjalankan sistem kenegaraan dengan paham kebangsaan berusaha keras agar dapat mengintegrasikan seluruh komponen bangsa, membangun satu sinergi untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang sejahtera, adil makmur berdasarkan falsafah negara Pancasila. Dasar Negara Pancasila, tidak hanya dilihat sebagai satu kerangka prikehidupan berbangsa, tetapi juga satu cita-cita mulia, agar bangsa ini dapat hidup sejahtera secara bersama-sama, tanpa mempersoalkan adanya perbedaan suku, agama, bahasa, budaya, dan lain-lain yang telah hidup dan tumbuh subur di bumi Indonesia. Disadari bahwa bangsa ini adalah bangsa yang multikultural, maka seluruh masyarakat sepakat untuk membangun keberagaman budayanya dan hidup saling menghargai satu dengan yang lainnya.

Dengan begitu, muncul sentimen kebangsaan yang dapat dilihat memiliki dua dimensi yang saling terkait,

yakni : dimensi internal dan dimensi eksternal. Dimensi internal mengacu pada kemampuan domestik untuk menciptakan iklim yang kondusif, memadai bagi pembangunan nasional yang perlu dinikmati oleh setiap etnik yang menjadikan bangsa itu, sedangkan dimensi eksternal menunjuk pada adanya kemampuan bangsa (nasional) dalam menjalankan hubungan luar negerinya dengan aktor-aktor negara lainnya. Dengan paham kebangsaan itu, orientasi nasional akan menjadi satu determinan penting dalam politik luar negeri suatu negara.

Sejak awal, usaha menjaga integrasi bangsa telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Dengan menganut paham kebangsaan, Pemerintah Indonesia berusaha menjalankan politik luar dan dalam negerinya dengan mengutamakan kepentingan bangsa. Akan tetapi dalam proses integrasi atau pembentukan dan pembangunan paham kebangsaan Indonesia tampak cukup tersendat-sendat, karena lemahnya ikatan kebangsaan, baik karena faktor kontakannya dengan perkembangan global, maupun munculnya kembali sentimen sempit etnis, kepentingan kelompok yang sering membawa konflik, bahkan menjadi apa yang dirasakan sebagai krisis kebangsaan.

Dilihat dari sisi sejarah, keadaan semacam itu memang tidak tiba-tiba muncul. Seperti adanya kontak dengan dunia luar. Hal ini dapat dilihat kembali ke zaman yang lalu, yakni zaman datangnya pengaruh Eropa (Barat) di kepulauan. Sejak abad ke XIX, semakin gencar abad XX), pengaruh modern (Barat) semakin meresap merasuk ke dalam kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai perilaku, cara hidup, nilai-nilai kemasyarakatan mengalami kemajuan, dan bahkan semakin lama semakin mempengaruhi cara hidup dan berpikir bangsa Indonesia ini.

Pada abad XX, pengaruh luar yang sering disebut sebagai budaya modernitas, atau globalisasi, semakin leluasa masuk ke Indonesia. Sistem teknologi yang canggih membuat hubungan individu satu dengan yang lain, menjadi tanpa batas. Hubungan itu dapat melampaui batas-batas ruang dan waktu. Karena adanya hubungan yang semakin mengglobal, dan semangat konsumerisme itu tampak telah mengendorkan, melemahkan sikap-sikap primordial bangsa yang sebelumnya memberi semangat pada kehidupan masyarakat. Semakin lemahnya rasa

nasionalisme bangsa ini semakin memicu munculnya konflik-konflik antar kelompok yang ada di dalamnya.

Dalam era globalisasi, konflik-konflik yang muncul tidak hanya diakibatkan oleh perbedaan kepentingan ideologi ataupun ekonomi. Tetapi juga sering karena adanya perbedaan peradaban. Menurut Huntington, peradaban adalah sebuah ikatan kultural yang terbentuk atas kelompok etnis, agama, dan bahasa dari suatu kelompok masyarakat. Pecahnya konflik-konflik antar etnis yang terjadi di negeri-negeri Afrika, adalah contoh dari adanya perbenturan peradaban (Huntington, 1968). Dalam hubungan itu, tampak bahwa Huntington melihat bagaimana perbedaan kebudayaan, atau keberagaman dalam kebudayaan dapat membawa konflik antar kelompok. Sampai disini nampak bahwa globalisasi, atau modernitas budaya, telah membawa serta setidaknya suasana konflik, atau benturan antar peradaban, yaitu benturan antara peradaban Barat dan Timur, juga benturan antara peradaban modern dan tradisional.

Selain itu, sifat pluralis bangsa Indonesia, yang merupakan bibit laten, juga sistem pemerintahan yang sentralistis di masa Orde Baru ini masih menjadi contoh bagaimana penyimpangan-penyimpangan itu terjadi. Garis-garis Besar Haluan Negara pada masa itu senantiasa memberi gambaran yang baik mengenai era pembangunan bangsa menuju cita-cita kehidupan berbangsa berlandaskan demokrasi Pancasila. Namun di dalam pelaksanaannya, semua nampak dapat diatur secara sentralis, yang kemudian membawa berbagai kekecewaan di daerah. Beberapa kebijakan pemerintah yang berorientasi pada stabilitas politik, tampak menjadi faktor penting dalam proses penyeragaman budaya. Penyeragaman sistem dan struktur pemerintahan desa, merupakan salah satu bentuk pemaksaan atas masyarakat adat yang sebelumnya otonom (Abdon Nababan, 1995 : 429). Secara jelas Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, telah memaksa sistem pemerintahan desa menjadi seragam di seluruh Indonesia. Hanya di Bali penyeragaman itu sulit dilakukan, sehingga tetap eksis dengan apa yang dikenal sebagai desa adat dan desa dinas (Warren, 2002 : Parimarta, 2001). Keadaan penekanan, atau dominasi seperti itu dapat menjadi sumber munculnya berbagai krisis kebangsaan.

Pada masa pemerintah Orde Baru, pembangunan bangsa Indonesia berbalik 180 derajat. Sebelumnya, dimasa yang dikenal sebagai Orde Lama, pemerintahan lebih menekankan pada pembangunan mental dan keutuhan bangsa (*character building*), mempersiapkan bangsa menuju era baru yang modern. Memasuki masa Orde Baru arah pembangunan diubah lebih berorientasi pada ekonomi, dengan harapan dapat membangun bangsa secara cepat dalam bidang ekonomi (kesejahteraan). Untuk dapat membangun ekonomi secara cepat, pemerintah membuat hutang yang besar kepada dunia luar, tidak hanya besar, bahkan berlebihan – menurut ahli sejarah politik Roeslan Abdulgani. Sejalan dengan semangat kapitalisme dunia, dan budaya modernitas, masyarakat Indonesia terjebak ke dalam ideologi kapitalis, yang sekaligus memiliki watak dari kemakmuran yang dijanjikan ideologi kapitalis, yang sekaligus memiliki watak konsumeris dalam menikmati hidup. Akibatnya muncul krisis moneter pada tahun 1997. mengatasi krisis berkepanjangan, dilakukan usaha memperbaiki keadaan ekonomi, dengan istilah reformasi ekonomi. Hal ini juga dilakukan dengan mengadakan pinjaman kepada dunia luar. Kali ini pinjaman diminta kepada Dana Moneter Internasional (IMF), yang memberikan persyaratan sebagai imbalan bantuan sebesar 43 milyar dollar AS. Persyaratan itu adalah : (1) dihapuskannya politik monopoli pemerintah Indonesia yang menyengsarakan rakyat kecil, (2) diadakan perombakan bentuk-bentuk perusahaan yang berwatak kerabatisme (*cronyism*). Perbaikan perekonomian ini-pun tampaknya belum memenuhi harapan masyarakat. Akhirnya, rezim Orde Baru itu jatuh akibat adanya kekuatan reformasi yang juga melengserkan Soeharto sebagai presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998 (Roeslan Abdulgani, *Bali Post*, 31-5-2002, hal 7).

Betapa pun semangat reformasi telah tumbuh dan mencoba membawa perubahan untuk perbaikan kehidupan bangsa, namun masih saja ada hambatan, ganjalan dalam pelaksanaannya. Banyak faktor yang dapat dilihat sebagai penghambat, seperti masih bercokolnya kekuatan unsur-unsur anti reformasi, adanya kelompok kepentingan yang sulit dipertemukan, dikotomi kepentingan pusat-daerah, dan lain-lain. Karena kompaknya unsur krisis itu, maka muncul istilah, “krisis multidimensional”, atau di era ini disebut *krisis reformasi*, yang pada

hakekatnya dapat dilihat sebagai krisis kebudayaan bangsa secara keseluruhan, seperti adanya konflik-konflik etnik yang belakangan ini terjadi. Sebagai contoh terjadinya konflik Madura-Dayak, konflik etnik di Ambon, konflik di Sulawesi, konflik di Jakarta, dan lain sebagainya yang dapat dilihat sebagai suatu bentuk krisis peradaban, yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Barangkali konflik-konflik itu muncul sebagai satu fenomena kompensasi jiwa bangsa yang multikultural, yang sebelumnya tertekan di bawah kekuasaan Orde Baru, yang kini terlepas tanpa arah yang jelas. Kondisi semacam ini bisa saja dilihat sebagai suatu bentuk krisis kebangsaan dan krisis kebudayaan. Maka ketika para praktisi mengajukan pemecahan dengan perbaikan ekonomi, atau dengan penegakan supremasi hukum semuanya tidak mampu membawa bangsa ini keluar dari krisis tersebut.

Munculnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang diharap dapat memberikan keleluasaan pada daerah-daerah untuk mengurus-mengurus urusannya sendiri berdasarkan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, juga belum jelas arahnya. Nampak Undang-Undang itu masih banyak menggunakan logika serta indikator ekonomi dalam merumuskan konsepnya. Oleh sebab itu, konsep otonomi daerah ini menjadi sangat bias ekonomi, dan bukan lagi dilihat sebagai sebuah keputusan politik. Contoh, bagi daerah yang tidak mampu secara ekonomi melaksanakan otonomi, akan digabung dengan daerah yang lain (Tim Lopera, 2000 : XXIII). Maka dari itu, Undang-Undang otonomi daerah ini-pun tampak belum memberikan solusi atas krisis yang sedang melanda bangsa ini, bahkan cenderung memunculkan arogansi daerah dalam pelaksanaannya. Dalam hubungan ini, bisa dimengerti bahwa :

“Reformasi sistem pemerintahan masih menjadi konsep topdown, yang proses pembagian otoritas politik (*political authority*) masih didasarkan pada konsepsi politik dan kemauan politik (*political will*) pemerintah pusat. Otoritas lokal belum menjadi praktek aktual yang berlangsung secara dialogis dalam hubungan pusat dan daerah”, sebagaimana juga dikatakan oleh Irwan Abdullah bahwa “Proses penyatuan dan penyeragaman kebudayaan telah terjadi pada masa Orde Baru, dan hingga setelah Orde Baru pun belum tampak adanya perubahan

(pengembangan kebudayaan lokal). Sementara, sepanjang masa Orde Baru tampak semua warga disibukan dengan upaya-upaya pengembangan kebudayaan Nasional yang juga sesungguhnya tidak pernah ada” (Abdullah, 2002 : 14).

Dapat dimengerti, jika Irwan Abdullah menyatakan bahwa kebudayaan nasional tidak pernah ada, karena ia selalu bergerak, dan terus tumbuh dalam satu proses yang dinamis. Mungkin juga Irwan ragu kalau simbol kebudayaan nasional akan mampu membawa gerak perkembangan bangsa ini ke arah yang integratif. Yang nyata adalah kelompok-kelompok pendukung kebudayaan daerah yang secara kompak telah menyatakan siap membangun bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Itulah yang terjadi pada proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Karena bangsa Indonesia sedang tumbuh, dan tetap akan tumbuh, maka kebudayaannya pun sedang tumbuh dan belum merupakan sesuatu yang bulat dan utuh, akan tetapi tetap tumbuh.

Maka jika dilihat dari segi akarnya di Indonesia, unsur krisis itu dapat dikelompokkan atas dua yakni : faktor luar dan dalam. Sebagai faktor luar dapat dilihat bahwa globalisasi budaya modernitas telah melanda masyarakat Indonesia, membawa perubahan-perubahan di dalam cara, dan gaya hidup, mengarah pada ciri-ciri modern, individual, konsumtif. Dapat dimengerti, bahwa globalisasi budaya modernitas merupakan globalisasi dalam level budaya yang mengacu pada prinsip hidup modern, tercermin dalam ideologi kultural konsumerisme (Triyono, 1996: 137). Adanya sentuhan budaya global, menyebabkan semakin banyak warga bangsa Indonesia terpengaruh, sehingga membuat mereka mudah berhubungan dengan dunia luar, dan mengaburkan pandangannya terhadap identitas negara bangsa. Semangat nasional ini mencair menjadi semangat dunia yang tanpa batas. Semua dipercepat dengan majunya teknologi informasi, dan komunikasi, yang membawa seseorang dengan mudah dapat berhubungan dengan orang lain, di luar wilayah negara sendiri. Faktor kedua, adalah faktor dalam negeri sendiri. Sebagai bangsa yang plural, dan multikultural, kini sentimen etnik semakin terpancing menampakkan sikap anasional, kurang toleransi, tetapi mengutamakan kepentingan kelompok sempit yang meresahkan. Terjadinya konflik-konflik dan bentrok antar etnik yang semakin runyam sebagaimana

diungkapkan di atas merupakan contoh dari situasi krisis kebangsaan, krisis kebudayaan yang sedang melanda bangsa.

Sejak awal tumbuhnya bangsa Indonesia, telah dikenal bahwa bangsa ini terdiri atas berbagai suku bangsa dengan daerah/wilayahnya sendiri, sehingga dikenal dengan bangsa yang plural, berdimensi jamak dalam segi etnik. Munculnya satu bangsa dalam wujud plural itu, bukanlah sesuatu yang kebetulan, tetapi melalui pengalaman sejarah yang panjang, setelah bergelut dengan pahit getir perjuangan mengusir penjajahan.

Secara etnik dan geografis, jelas bahwa bangsa Indonesia tidak hanya plural dalam arti etnik, tetapi juga multi dalam arti cultural. Maka paham multikultural perlu dikembangkan, demi munculnya rasa saling menghargai antar sesama multikultural, atau multikulturalisme yang sesungguhnya merupakan reaksi atas dominasi yang semakin luas dari budaya modernitas yang menekan, mematikan kreatifitas budaya lokal. Pandangan ini sejalan dengan semangat postmodernisme yang sedang berkembang dan memberi dukungan kepada kebhinekaan budaya yang tidak terikat pada dominasi globalisasi. Paham ini dapat mempertemukan budaya global dan budaya lokal untuk dapat hidup bersama dan berinteraksi saling mendukung satu dengan yang lainnya, yang disebut dengan istilah Glokalisasi budaya.

Diterapkannya Undang-undang Otonomi Daerah (OTDA), dapat dimengerti sebagai bagian dari kesadaran multikultural. Sebagai bangsa yang sadar akan warisan budayanya, maka setiap warganya patut memelihara warisan dan nilai-nilainya, mengembangkan sikap toleransi yang tinggi terhadap berbagai perbedaan yang ada. Semangat demokrasi dalam wadah Negara Kesatuan Indonesia. Bhineka Tunggal Ika merupakan satu konsep mengenai toleransi, hidup bersama dalam keberagaman, dan dalam satu wilayah tertentu secara bersama. Itu adalah satu konsepsi yang sejalan dengan pandangan multikulturalisme yang berkembang berhadapan dengan paham global yang ingin menyeragamkan kehidupan dunia. Oleh karena itu, konsep Bhineka Tunggal Ika hidup terus di dada bangsa Indonesia, dipelihara, dan dikembangkan secara terus menerus sehingga setiap generasi mampu memberi makna kepada eksistensi dirinya sebagai satu bangsa yang

bhineka (berbeda) tetapi tunggal ika (satu itu). Namun, dengan semangat multikultural atau Bhineka Tunggal Ika, bangsa Indonesia mampu mengatasi berbagai krisis bangsa yang timbul atas pandangan sempit di tengah peradaban manusia yang terus bergerak.

MULTIKULTURALISME DAN PARIWISATA BALI

Pariwisata adalah “segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha obyek wisata dan daya tarik wisata usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut” (Perda Tingkat I Bali Nomor 3/1991, Bab 1, pasal 1). Penyelenggaraan usaha-usaha tersebut tidak terlepas dari pubisnis pariwisata dan wisatawan, yakni “setiap orang yang mengunjungi suatu negara tempat tinggalnya yang biasa, untuk berbagai tujuan selain mencari dan melakukan suatu pekerjaan yang menguntungkan di negara yang dikunjungi” (Wirawan, 1989 : 26). Mereka memiliki kaitan yang sangat erat, mengingat bahwa pebisnis mengusahakan objek, sedangkan wisatawan menikmatinya, sehingga timbul pertukaran barang dan atau jasa yang berdimensi ekonomis.

Penikmatan ini dilakukan dengan cara wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata lebih dari 24 jam. Selama mereka tinggal di daerah tujuan wisata mereka tidak saja melakukan komunikasi ekonomis, tetapi juga komunikasi antarbudaya dengan masyarakat tempatan atau tuan rumah. Karena itulah, kehadiran mereka di daerah tujuan wisata tidak saja secara fisik dan ekonomis, tetapi juga secara kultural. Dalam artian, kehadiran mereka tidak hanya menikmati apa yang dibutuhkan dan dibayar dengan dolar, tetapi sekaligus juga melakukan hubungan sosial budaya dengan masyarakat setempat, sehingga terjadi hubungan budaya secara timbal balik. Dengan demikian, dalam perspektif antropologis maupun sosiologis pariwisata sekurang-kurangnya mencakup dua dimensi, yakni dimensi ekonomis dan kultural (Usman, 1998).

Hubungan ekonomis maupun kultural yang berlangsung antara wisatawan dengan masyarakat setempat bisa menimbulkan berbagai dampak antara lain adalah dampak kultural, yakni pengaruh pada bidang kebudayaan baik pada masyarakat setempat maupun wisatawan. Dampak kebudayaan bisa yang

diinginkan yang lazim disebut dampak positif, atau bisa pula dampak yang tidak diinginkan ini lazim disebut dampak negatif (Suratmo, 1991, Soemarwoto, 1989). Kriteria untuk menentukan dampak positif maupun negatif adalah kefungsionalan bagi kelangsungan hidup sistem sosial maupun sistem organisme. Dalam artian, kalau hal itu memberikan kontribusi positif maka disebut berdampak positif, begitu pula sebaliknya.

Kemunculan dampak budaya dalam pariwisata tidak bisa dilepaskan dari kehadiran wisatawan pada suatu ruang atau lokasi yang dihuni oleh masyarakat setempat. Namun, mengingat bahwa peristiwa memiliki pula dimensi ekonomis yang luas dan kompleks, maka tidak mengherankan jika pada suatu daerah tujuan wisata hadir banyak orang dengan tujuan mencari nafkah. Para pencari nafkah berasal dari masyarakat setempat maupun orang luar. Pada ruang yang sama mereka berinteraksi satu sama lainnya sehingga membentuk suatu sistem sosial.

Wisatawan maupun migran pencari nafkah, terutama yang bukan berasal dari masyarakat setempat tidak bisa melepaskan kebudayaannya. Karena, kebudayaan yang mereka miliki terinternalisasi melalui proses enkulturasi, pelaziman budaya atau pemrograman budaya yang membuat mereka ketika bermigrasi akan tetap membawa kebudayaannya. Sebaliknya, masyarakat setempat sebagai tuan rumah, dengan sendirinya juga terikat kepada kebudayaan yang memiliki. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika pada suatu daerah tujuan wisata terutama pada kawasan hunian wisata muncul masyarakat pluralistik atau multikultural yang begitu kental, seperti tampak pada kawasan wisata Kuta, Sanur, Lovina, Candi Dasa, dll.

Masyarakat setempat, wisatawan maupun migran pencari nafkah memiliki motivasi sendiri-sendiri atau bahkan bisa juga sama maupun saling saling melengkapi, karena bermain dalam ruang yang sama, maka satu sama lainnya akan terlibat dalam suatu komunikasi antar budaya, mengingat bahwa produsen pesan adalah anggota suatu budaya, sedangkan penerima pesannya adalah anggota suatu budaya lainnya (Porter dan Samovor, 1990). Eilers (1995) menunjukkan dalam komunikasi antarbudaya akan terjadi suatu proses interaktif, berlandaskan pada tujuan bersama, tidak resmi dan pengungkapan pesan lewat interaksi.

Motivasi-motivasi itu, baik secara terpisah maupun yang satu dengan yang lainnya berkomplementer, mendorong wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata. di daerah tujuan wisata mereka akan berhubungan dengan masyarakat tempatan yang berstatus sebagai tuan rumah. Masyarakat tempatan memiliki sistem budaya yang terdiri dari beberapa unsur, yakni bahasa, sistem ekonomi, sistem kesehatan, organisasi sosial, peralatan dan perlengkapan hidup, sistem religi, sistem kesenian dan sistem rekreasi. Unsur-unsur tersebut berkombinasi atau saling berhubungan yang merupakan suatu kesatuan (Koentjaraningrat 1983 ; Harris dan Moran, 1990).

Kedatangan wisatawan menimbulkan peluang kerja sehingga mengundang penduduk tempatan maupun orang luar untuk bermigrasi ke daerah-daerah daerah tujuan wisata, dengan tujuan utama mencari nafkah. Hal ini dapat dilihat di Bali, dimana banyak etnik non-Bali yang bermigrasi ke Bali, misalnya etnik Jawa, Madura, Minangkabau, Sasak, Batak, dll. Kedatangan mereka ke Bali membawa pula sistem budaya yang mereka miliki. Karena itu, tidak mengherankan jika di suatu daerah tujuan wisata bisa muncul masyarakat multibudaya.

Wisatawan, masyarakat tempatan dan migran pencari nafkah berhubungan satu sama lainnya dalam konteks komunikasi antarbudaya. Hubungan mereka lebih banyak bermotifkan ekonomi dan tunduk kepada sistem ekonomi, yakni nilai jual ekonomi itu mutlak memerlukan kebudayaan mediasi, terutama adalah bahasa, baik bahasa lisan, tertulis maupun gerak anggota badan (*gestures*). Bahasa yang dipakai bisa berasal dari kebudayaan lokal (bahasa Bali), kebudayaan nasional (bahasa Indonesia), atau kebudayaan global, bahasa dunia atau asing, misalnya bahasa Inggris, Jepang, Cina, dll. Atau mereka bisa pula menggunakan kebudayaan lokal antara lain berbentuk bahasa campuran sebagaimana yang sering dipakai pada tempat-tempat umum, misalnya di pasar (Suparlan, 1986).

Unsur lainnya yang dapat pula berfungsi sebagai mediasi adalah aspek-aspek budaya yang disuguhkan oleh tuan rumah maupun migran pencari nafkah kepada wisatawan, sehingga mereka bisa berhubungan dalam tata ekonomi pasar secara timbal-balik. Hal ini pun bisa diambilkan dari

kebudayaan lokal, misalnya kesenian (tari, musik, lukis, seni kuliner), sistem ritual, peninggalan sejarah, dll. Dengan adanya media ini timbullah komunikasi antar budaya yang bersifat visual, verbal, tindakan, kimiawi, dll. Bahkan yang tidak kalah pentingnya, bisa pula terjadi bahwa aspek-aspek tersebut diambilkan dari kebudayaan global, sebagaimana terlihat dari adanya pusat-pusat hiburan, hotel atau rumah-rumah makan bertaraf internasional atau mengikuti selera negara tertentu. Dengan cara ini diharapkan wisatawan bisa betah di suatu daerah tujuan wisata, karena selera budaya mereka yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar terpenuhi secara optimal. Untuk merebut pasar wisata terutama dalam kesenian diperlukan kemasan berbagai atraksi wisata yang dibentuk dari berbagai keunikan lokal dari masing-masing kabupaten. Dengan demikian atraksi-atraksi wisata lokal ini dapat bersaing di pasar global.

Wisatawan tidak seluruhnya bisa berbahasa Indonesia maupun berbahasa daerah, begitu pula masyarakat tempatan tidak semuanya bisa berbahasa asing. Belum terhitung lagi adanya kenyataan bahwa sebagai orang asing, wisatawan tidak mengenal secara baik daerah yang dikunjunginya. Karena itu hubungan antarbudaya bisa mengalami kendala cultural. Dalam kaitan inilah diperlukan *broker* budaya, yakni mereka yang bertindak sebagai orang tengah atau perantara budaya antara sistem lokal dengan sistem nasional; masyarakat Bali dengan wisatawan domestik, atau antara sistem lokal dan sistem nasional dengan sistem global; masyarakat Bali, masyarakat Indonesia dan wisatawan mancanegara. Pada umumnya, mereka terdiri dari juru bahasa, pemandu wisata atau penjual cenderamata (Matheison dan Wall, 1991). Sebagai *broker* budaya, mereka fasih linguistik – menguasai aneka bahasa, misalnya untuk kasus Bali, mereka tidak saja menguasai bahasa ibu – Bahasa Bali, tetapi juga bahasa Indonesia dan bahasa asing. Bahkan, tidak menutup pula kemungkinan mereka fasih budaya, sehingga peranan mereka sebagai *broker* budaya bisa berlangsung secara baik.

Kunjungan wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata berlangsung secara kontinu, bahkan ada musim-musim tertentu daerah tujuan wisata mengalami kebanjiran wisatawan (Mahieson dan Wall, 1991). Begitu pula migran pencari nafkah yang datang ke suatu daerah tujuan wisata, seperti yang tampak di

Bali, semakin lama semakin banyak. Mereka menetap atau bahkan berkampung halaman di Bali, sehingga masyarakat Bali menjadi semakin pluralistic. Hubungan wisatawan, migran pencari nafkah dengan masyarakat tempatan terjadi secara tangan pertama dan kontinu, sehingga terbentuklah akulturasi (Berry *et.al.* 1999).

Akulturasi bisa menimbulkan respon yang bervariasi pada tatanan individu maupun kelompok sistem sosial. Respon yang bisa terjadi adalah masyarakat tempatan mengagumi kebudayaan asing, baik yang berasal dari wisatawan maupun kebudayaan para migran, dan sebaliknya mereka menolak kebudayaan sendiri. Sejalan dengan itu mereka menerima kebudayaan luar dengan penuh kegairahan, dan sebaliknya mereka melakukan *passing* atau meninggalkan kebudayaan sendiri. Karena itu, secara perlahan-lahan sistem budaya tempatan akan digantikan dengan sistem budaya asing. Pada tingkatan individu semakin banyak orang kehilangan identitas etniknya, bahkan mereka mengejek atau menjelekkkan kebudayaan sendiri. Pada tataran masyarakat akan muncul dampak erosi budaya maupun asimilasi, yakni masyarakat tempatan meleburkan dirinya secara total pada budaya asing. Gejala ini sering pula disebut *cocacolonisasi* atau *captive mind syndrom*, yakni menerima segala bentuk produk asing (Barat), bahkan sampai ke sistem berpikir ala Barat (Yusuf, 1991). Segala sesuatu dari Barat diterima tanpa kritik, sehingga terbentuk manusia yang secara fisik adalah serupa ini maka dengan meminjam apa yang dikemukakan Naisbit dan bahwa pariwisata telah berubah menjadi imperialisme cultural. Keadaan ini dapat mengancam kelangsungan hidup nasionalisme maupun budaya etnik yang mereka miliki.

Respon lainnya bisa bersifat berlawanan daripada *passing*, yakni terjadi penolakan terhadap kebudayaan luar yang disertai dengan sikap melebih-lebihkan kebudayaan sendiri. Pada tataran kehidupan berbangsa dan bernegara bias melahirkan nasionalisme cultural atau bahkan mengarah kepada *chavinistik*. Sedangkan pada tataran etnik bisa melahirkan etnosentristik bahkan mengarah kepada *xenophobia*. Sejalan dengan itu sistem budaya nasional maupun budaya etnik menjadi kuat dan menonjol, sebaliknya sistem budaya luar menjadi lemah. Hal ini bisa melahirkan sikap meremehkan maupun memusuhi orang luar, baik dalam bentuk

wacana maupun tindakan kekerasan. Akibatnya, pada tataran sistem sosial timbul friksi antarkelompok maupun antaretnik yang pada akhirnya bisa melahirkan konflik sosial.

Selain itu, bisa pula timbul respon dalam bentuk marginalisasi, yakni terbentuknya manusia yang terombang-ambing antara budaya sendiri dan budaya asing. Mereka tidak menentukan anutan budaya secara tegas, semuanya diterima secara serempak, namun tidak dihayati sampai ke aspek maknanya. Akibatnya timbul pendangkalan budaya maupun keraguan dalam bertindak, karena mereka tidak memiliki resep bertindak yang pasti. Orang marginal akan sulit diterima atau sulit bisa masuk ke dalam kelompok yang menyukai budaya luar maupun budaya tempatan. Kesemuanya ini dapat mengakibatkan manusia mengalami stress akulturasi yang antara lain dapat berwujud perasaan marginalitas dan alienasi (Berry *et al*, 1999). Kondisi ini dapat mendorong mereka untuk menggerakkan perubahan sosial dan sekaligus menciptakan kemantapan anutan budaya agar kermarginalisasian mereka tidak berlarut-larut.

Respon lainnya adalah mereka mampu mengintegrasikan kebudayaan luar dengan kebudayaan tempatan, sehingga menimbulkan hubungan harmoni pada tataran sistem sosial. Hal ini tidak semata-mata karena mereka memiliki anutan budaya yang pasti, tetapi juga karena mereka mampu membangun sistem sosial yang berasaskan pluralisme dan pemeliharaan kebudayaan secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan sasaran ini diperlukan *mediating person*, yakni orang yang berkemampuan menyaring, mengombinasikan, serta menyintesis kebudayaan luar dengan kebudayaan tempatan tanpa menanggalkan aspek aslinya, sehingga melahirkan suatu bentuk kebudayaan yang layak bagi kelangsungan hidup sistem sosial (Yusuf, 1991). Dengan mengacu kepada temuan Horikoshi (1987) peranan *mediating person* acapkali berada ditangan para pemimpin tradisional.

Bali sebagai daerah tujuan wisata telah dikenal sejak akhir abad XIX, dan terus berlangsung sampai saat ini. Bahkan, pengembangan Bali sebagai daerah tujuan wisata telah mencapai taraf kematangan (Bandem, 1996; Atmadja, 1992). Pencapaian taraf ini tentu menimbulkan berbagai dampak kultural pada masyarakat Bali. Masalah ini sering didiskusikan

dalam aneka kegaitan ilmiah maupun paparan pada berbagai media komunikasi kebudayaan. Dalam diskursus itu, secara garis besarnya muncul dua pandangan, yakni pandangan pesimistik dan pandangan optimistik. Pandangan pesimistik beranggapan bahwa peristiwa lebih banyak berdampak kultural negatif bagi kebudayaan Bali. Dengan mengacu kepada Matheison dan Wall (1991) pandangan pesimistik tidak bisa dilepaskan dari adanya kenyataan bahwa wisatawan yang berkunjung ke Bali kebanyakan berasal dari negara-negara yang secara ekonomis dan kultural termasuk negara maju. Kondisi ini mempengaruhi pola aliran budaya, yakni lebih kuat dari negara maju ke negara miskin, sehingga akulturasi yang bercorak asimilasi sulit dihindarkan. Sebaliknya, mereka yang mereka miliki, baik yang bersumberkan pada pengalaman mereka dalam bersumberkan pada agama Hindu, mereka berkemampuan mengadaptasikan atau melokalisasikan kebudayaan luar sehingga sistem sosial mereka tetap berlangsung secara harmoni.

Pariwisata Dan Kebudayaan Bali

Bertolak dari bukti-bukti kondisi kultural masyarakat Bali di kekinian maupun di kelampauan seperti tercermin pada perjalanan Sejarah Bali, tampak bahwa pandangan optimistik cukup beralasan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari adanya kenyataan bahwa dalam menyikapi pengaruh kebudayaan luar mereka tidak memilih respon menolak atas dasar etnosentrisme. Begitu pula pencapaian taraf kematangan dalam pengembangan Bali sebagai daerah tujuan wisata, tidak bisa dilepaskan dari keterbukaan masyarakat Bali terhadap wisatawan maupun migran pencari nafkah yang mengalir ke Bali. Masyarakat Bali memiliki *local genius* untuk melakukan *mediating* dalam merespon kebudayaan luar yang masuk ke Bali, sehingga masyarakat Bali tetap terintegrasi secara baik. Namun, sesuai dengan konsep *rwa bhineka* atau *oposissi binary* maka pandangan yang bernada pesimistik pun tidak bisa diabaikan. Karena bagaimanapun juga, di balik keoptimisan selalu ada kemungkinan-kemungkinan yang mempesimiskan, atau di balik dampak kultural yang positif selalu ada dampak kultural yang negatif.

Mengacu kepada pendapat Cohen (1984) dan Pitana (1996) dampak sosial maupun kultural pariwisata bisa dicermati pada sepuluh bidang atau aspek, yaitu 1) dampak terhadap keterkaitan dan keterlibatan antara

masyarakat setempat dengan masyarakat yang lebih luas, termasuk tingkat otonomi atau ketergantungannya; 2) dampak terhadap hubungan interpersonal antara anggota masyarakat; 3) dampak terhadap dasar-dasar organisasi dan kelembagaan sosial; 4) dampak terhadap migrasi dari dan ke daerah pariwisata; 5) dampak terhadap ritme kehidupan sosial masyarakat; 6) dampak terhadap pola pembagian kerja; 7) dampak terhadap stratifikasi dan mobilitas sosial; 8) dampak terhadap distribusi dan pengaruh kekuasaan; 9) dampak terhadap meningkatnya penyimpangan-penyimpangan sosial; dan 10) dampak terhadap bidang kesenian dan adat-istiadat (Ave dan Hilling ed., 1992; France ed., 1997; Griya, 1996; Spillanne, 1994).

Dampak pariwisata dalam bidang kesenian misalnya, selalu menjadi bahan perdebatan yang hangat. Pertanyaan yang seringkali diperdebatkan, yakni apakah pariwisata internasional *enriching* (memperkaya) budaya ataukah *degrading* (memerosotkan) budaya (Soedarsono, 1999, Ave dan Hilling ed., 1992). Untuk kasus Bali pertanyaan serupa ini sering pula diketengahkan, bahkan telah pernah diteliti oleh Pugeh *et.al.* (1999). Mereka menemukan bahwa pariwisata berdampak positif terhadap kesenian Bali, yakni menimbulkan *revitalisme* – gairah baru dalam berkesenian. Hal ini bisa berwujud *revival* – menghidupkan kembali seni yang telah mati, *reformation* – pembaruan terhadap unsur-unsur seni yang telah ada, atau *recreation* – menciptakan karya seni yang baru, sesuai dengan rangsangan yang diberikan oleh wisatawan.

Sejalan dengan temuan itu, Moquet (1971), Mathieson dan Wall (1991) dan Soedarsono (1999) mengemukakan bahwa ada berbagai sebutan yang digunakan untuk melabeli seni pertunjukan yang diciptakan untuk pariwisata, yakni *art by metamorphosis* (seni yang telah mengalami perubahan bentuk), *art of acculturation* (seni yang merupakan akulturasi antara selera estetis wisatawan), *pseudo-tradisional art* (seni bersifat semu) karena apabila diamati, bentuk seni pertunjukan pariwisata Bali yang berkembang kini tampak mengacu kepada bentuk-bentuk seni pertunjukan tradisional daerah ini, namun ditampilkan dengan tanpa unsur-unsur yang disakralkan masyarakat setempat. Seni pertunjukan serupa ini sering disebut *tourist art* karena sengaja

ditampilkan untuk wisatawan. Seni serupa ini telah berubah maknanya, yakni menjadi suatu komoditi sebagaimana benda-benda souvenir yang dijual di bandara Internasional. Komodifikasi seni seperti ini bisa saja akan dapat menimbulkan permasalahan, memberi dampak negatif seperti desakralisasi terhadap seni pertunjukan tersebut. Namun demi uang, manusia sering melakukan pencurian terhadap berbagai karya seni yang berfungsi sebagai peralatan ritual sebagaimana sering terjadi di Bali. Begitu pula munculnya masalah imitasi seni, sebagaimana terjadinya penjualan patung-patung Asmat (suku Asmat di Irian Jaya) yang dibuat oleh pengerajin dari Desa Padang Bulia, Buleleng dan dijual di Bali sebagai *souvenir*. Benda seni *pseudo tradisional* ini seringkali dibuat secara massal sehingga nilai seni dan ketelitiannya kurang memperoleh perhatian. Oleh sebab itu, kemerosotan nilai seni yang dimiliki patung itu sangat sulit untuk dihindari (Mathieson dan Wall, 1991).

Dampak lainnya yang sering pula diperdebatkan adalah migrasi pencari nafkah ke Bali yang semakin lama semakin meningkat. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keunggulan, karena *pertama*, pada dirinya melekat motivasi dan panggilan kultural yang kuat. *Kedua*, mereka merasa terpilih daripada penduduk lainnya untuk bermigrasi. *Ketiga*, saluran bermigrasi biasanya memakai saluran keluarga – migrasi berantai (Pelly, 1994, 1997). Keunggulan ini menyebabkan banyak diantara mereka yang berhasil atau bahkan merupakan saingan bagi orang Bali, mengingat bahwa bidang usaha pencarian nafkah yang mereka tangani sama dengan apa yang ditangani oleh orang Bali sendiri. Persaingan memperebutkan sumber daya ekonomi, apalagi ditambah dengan adanya perdebatan identitas kesukubangsaan yang mereka miliki dapat mempermudah timbulnya konflik yang berbau SARA.

Memang benar, tidak semua migran sukses. Melainkan banyak pula di antara mereka yang kurang beruntung, sehingga menimbulkan berbagai masalah di Bali, seperti misalnya terjadinya pencemaran budaya yang berbentuk perilaku-perilaku menyimpang dan pencemaran lingkungan yang berbentuk menjamurnya pemukiman kumuh. Hal ini menimbulkan reaksi pada masyarakat Bali yang diwujudkan dalam bentuk reteritorialisasi atas ruang ekonomi maupun ruang kultur yang mereka miliki

(cf.Lull, 1993). Untuk menyikapi permasalahan-permasalahan ini terkadang tidak selamanya dari mereka yang diselesaikan dengan cara yang damai, melainkan tidak sedikit mereka mempergunakan cara kekerasan, sebagaimana tercermin dari kasus penertiban pedagang kaki lima di Kuta, penertiban rumah kumuh di Tanjung Benoa, dll. (Atmadja, 2000). Bahkan, sejalan dengan itu ada kecenderungan masyarakat Bali mengarah kepada etnosentrisme atau *xenophobia*.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa kunjungan wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata tidak semata berdimensi ekonomi tetapi juga berdimensi kultural. Hal ini mengingat bahwa kedatangan mereka yang rutin itu selalu disertai dengan membawa kebudayaannya. Begitu pula di daerah tujuan wisata yang mereka kunjungi, mereka menuntut pengembangan budaya yang sesuai dengan budaya mereka yang akhirnya demi dolar masyarakat setempat mengikutinya, sehingga lahirnya aneka produk budaya yang ditujukan bagi wisatawan. Selain itu, pariwisata menimbulkan pula peluang kerja. Akibatnya, banyak orang luar bermigrasi ke daerah tujuan wisata dengan tujuan utama untuk mencari nafkah. Mereka pun datang membawa serta kebudayaannya. Kesemuanya itu dapat menimbulkan dampak multikultural di daerah tujuan wisata, baik dampak yang diinginkan (positif) maupun dampak yang tidak diinginkan (negatif), dimana jika tidak ditanggulangi secara baik akan dapat menimbulkan disintegrasi sosial.

DAFTAR RUJUKAN

Atmadja, N.B. (1992), *Pelestarian Hutan Wisata Kera di Desa Adat Sangeh, Bali (Suatu Telaah tentang Peranan Desa Adat Dalam Mengelola Obyek Wisata)*, (Tesis Magister Tidak Diterbitkan pada Universitas Indonesia Jakarta).

Atmadja, N.B. (2000), *Pemertahanan Identitas Kebalian : Dari Deteritorial ke Teritorialisasi*. (Makalah dibawakan dalam Seminar Internasional tentang Kebudayaan Bali yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Budaya Bali).

Ave, J. dan J. Hillig. Ed. (1992), *Universal Tourism Enriching or Degrading Culture ?* Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Bandem, I Md. (1996), *Etnologi Tari Bali*, Yogyakarta, Kanisius.

Berry, J.W. et.al. (1999), *Psikologi Lintasbudaya Riset dan Aplikasi*, (Edi Suhardono Penerjemah), Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

Cohen, E. (1984), "The Sociology of Tourism : Approaches Issues and Findings", *Annal of Tourism Research*, Nomor 30. Halaman 236-226.

Ellisers, F.J. (1987), *Berkomunikasi Antara Budaya Suatu Pengantar Komunikasi Antarbudaya*, (J.Tondowidjo Penerjemah), Flores, Nusa Indah.

Erawan, I., ed. (1997), *Periwisata dan Pembangunan Ekonomi* (Bali sebagai kasus), Denpasar, Upada Sastra.

France, I., ed. (1997), *The Earthscan Reader in Ustainable Tourism*, London, Earthscan Publications Ltd.

Griya, Wy. (1995), *Pariwisata dan Dinamika Kebudayaan Lokal, Nasional, Global*, Denpasar, Upada Sastra.

Harris. Ph. R. dan R.T. Moran. (1990), "Memahami Perbedaan-perbedaan Budaya", Dalam Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat, ed., *Komunikasi Antarbudaya*, Badung, PT. Remadja Rosdakarya, Halaman 58-75.

Horikoshi, H. (1987), *Kyai dan Perubahan Sosial*, (Umar Basalin dan Andi Muarly Sunrawa Penerjemah), Jakarta, P3M.

Koentjaraningrat. (1983), *Pengantar Antropologi*, Jakarta, Aksara Baru.

Lull, J. (1993), *Media Komunikasi Kebudayaan Suatu Pendekatan Global*, (A. Setiawan Abadi Penerjemah), Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Maquet, J. (1971), *Introduction to Aesthetic Anthropology*, Massachusett, Addison Wesley.

- Mathieson, A. dan G. Wall. (1991), *Tourism : Economic, Physical and Social Impacts*, England, Longman Group UK Limited.
- Mathieson, A. dan Wall. (1991), *Tourism : Principles, Practices, Philosophies*, New York, John Wiley & Sons.
- Naisbitt, J. dan P. Aburdene. (1990), *Sepuluh Arah Baru untuk Tahun 1990-an Megatrends 2000*, (F.X. Budiyanto Penerjemah), Jakarta, Binarupa Aksara.
- Pelly, U. (1994), *Urbanisasi dan Adaptasi Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*, (Hartono Hadikusumo Penerjemah), Jakarta, LP3ES.
- Pelly, U. "Keserasian Manusia Pendatang dengan Lingkungan Tujuan", Dalam Rofik Ahmadi *ed.*, *Budaya Kepeloporan dalam Mobilitas Penduduk*, Jakarta Diterbitkan Atas Kerja Sama Puspa Swara dengan Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, Halaman 122-138.
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 3 Tahun 1991 tentang Peristiwa Budaya*, Denpasar, Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali.
- Pitana. I Gd. (1996), "Balinika-Cybernetica Pariwisata dan Religiusitas Kekinian Masyarakat Bali", *Pustaka Hindu Raditya*, I, Nomor 5, Halaman 161-179.
- Poster, R.E.T. dan L.A. Samovar. (1990), "Suatu Pendekatan terhadap Komunikasi Antabudaya", Dalam Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat *ed.*, *Komunikasi Antarbudaya*, Bandung, PT. Remadja Rosdakarya, Halaman 12-38.
- Pugeh, Kt.et.al, *Dampak Pariwisata terhadap Kesenian Etnis Bali dan Perilaku Masyarakat Bali di Daerah Propinsi Bali*, Singaraja, FKIP.
- Soedarsono, R.M. (1999), *Metodologi Penelitian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa dengan Contoh Untuk Tesis dan Disertasi*, Bandung, Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia.
- Soemarwoto, O. (1989), *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta, Djambatan.
- Spillane, J. (1994), *Pariwisata Indonesia Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*, Yogyakarta, Kanisius.
- Suparlan, P. (1986), "Penelitian bagi menunjang Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Nasional", Dalam A. Widjaja *ed.*, *Manusia Indonesia Individu Keluarga dan Masyarakat*, Jakarta, Akademika Pressindo. Halaman 81-88.
- Suratmo, G. (1991), *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Usman, S. (1998), *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Yusuf, Y. (1991), *Psikologi Antar Budaya*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Abdulgani, Roeslan. (2002), *Bali Post* (31-5), hal.7
- Abdullah, Irwan, (2002), Denpasar (Paper disampaikan dalam Simposium Internasional Anthropogi).
- Banyu Perwita, A.A. (1996), "Konflik Antar Etnis dalam Masyarakat Global dan Relevansinya Bagi Indonesia", dalam *Analisis CSIS* (Maret-April, XXV, No. 2), hal. 149-159.
- Featherstone, Mike. (1993), *Consumer Culture and Postmodernism*, London/New Delhi, SAGE Publication.
- Hutington, (1986), *Political Order in Changing Societies*, New Heven, Yale University Press.
- Muhammad Fuad. (2000), "Kebudayaan dan Perubahan Sosial dalam Tinjauan Teori", dalam *Wacana* (Vol.2, 1, April), hal. 18-30.
- Nagazumi, Akira. (1986), *Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Parimartha, I Gde. (2001), *Desa Adat dan Desa Dinas di Bali : Sebuah Refleksi Kesejahteraan*, Jakarta (Makalah disampaikan pada Konfrensi Nasional Sejarah VII, 28-31 Oktober).

Trijono, Lambang. (1996), "Globalisasi Modernitas dan Krisis Negara Bangsa: Tantangan Integrasi Nasional dalam Konteks Global", dalam *Analisis CSIS*, XXV, No. 2, hal. 136-148.

Warren, Carol A. (1990), *Adat and Dinas : Village and State in Cotemporary Bali*. University of Western Australia (Dissertation of Dept. of Anthropology).